

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) IMPLAN DI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Desa Galumbang dan Desa Bata)

Sukma Salamah¹, Yusran Fahmi², Gusti Muhammad Hidayatullah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: salamahsukma010@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan adalah dengan program KB, namun pada kecamatan Juai program KB Implan masih terkendala beberapa hal sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan Di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan Di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak optimal terimplementasi terlihat pada pertama, sub variabel komunikasi indikator kejelasan dan konsistensi. Kedua, sub variabel sumber daya indikator staf dan finansial. Ketiga, sub variabel disposisi indikator insentif. Keempat, sub variabel struktur birokrat indikator pembagian kerja. Adapun indikator yang sudah baik terimplementasi terlihat pada Pertama, sub variabel komunikasi indikator transmisi. Kedua, sub variabel Sumber daya indikator wewenang. Ketiga, sub variabel disposisi indikator komitmen. Keempat, sub variabel Struktur birokrat indikator standar operasional prosedur (SOP).

Kata Kunci : Implementasi, Program, KB Implan

ABSTRACT

One of the government's efforts to suppress the growth rate is with the KB program, but in Juai District, the KB Implant program is still constrained by several things so that the purpose of this study is to determine the Implementation of the Implant Family Planning (KB) Program in Juai District, Balangan Regency, and to determine the factors that influence it. With qualitative methods. The results of the study on the Implementation of the Implant Family Planning (KB) Program in Juai District, Balangan Regency, were not optimally implemented, as seen in the first, communication sub-variable, indicator of clarity and consistency. Second, resource sub-variable, indicator of staff and finance. Third, disposition sub-variable, indicator of incentives. Fourth, bureaucratic structure sub-variable, indicator of division of work. The indicators that have been well implemented are seen in the first, communication sub-variable, indicator of transmission. Second, resource sub-variable, indicator of authority. Third, disposition sub-variable, indicator of commitment. Fourth, bureaucratic structure sub-variable, indicator of standard operating procedures (SOP).

Keywords: Implementation, Program, KB Implant

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak luput dari masalah kependudukan. Secara garis besar masalah pokok dibidang kependudukan yang dihaapi Indonesia antara lain jumlah penduduk yang relative masih tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, struktur umum muda, dan kualitas penduduk masih harus di tingkatkan.

Agar Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik, harus diimbangi dengan peraturan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan dan angka kelahiran penduduk, hal ini dilakukan untuk kesejahteraan keluarga Indonesia, yang sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas di generasi Negara Indonesia mendatang.

Program Keluarga Berencana adalah Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan Sejahtera dengan membatasi kelahiran. Program ini bermakna untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta dalam Masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, mengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Penerapan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Penerapan KB di Kabupaten Balangan tidak hanya mencakup kontrasepsi hormonal, tetapi juga metode jangka panjang seperti IUD (Intra Uterine Device), implan, dan sterilisasi, serta kontrasepsi sementara seperti pil dan kondom. Pemerintah daerah mendukung program KB melalui anggaran dan kebijakan yang mendukung kesertaan masyarakat dalam program KB. Mereka juga bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjalankan program ini.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi dan mengendalikan angka kelahiran, akses terhadap alat dan obat kontrasepsi menjadi sangat penting. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi hadir sebagai respons terhadap tantangan tersebut, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kontrasepsi. Meskipun program keluarga berencana telah dilaksanakan selama beberapa dekade, masih terdapat kesenjangan dalam akses dan pemahaman masyarakat mengenai alat kontrasepsi.

Pengelolaan pelaksana program keluarga berencana memerlukan penanganan yang serius juga strategi yang tepat. Implementasi program pemerintah salah satunya dalah program yang terkait dengan bidang kependudukan. Bidang kependudukan tersebut dilaksanakan salah satunya oleh instansi badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional (BKKBN). BKKBN memiliki peranan dalam pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera namun juga

menyangkut masalah pengendalian penduduk. Pelaksanaan program kependudukan tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus salah satunya ialah kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat dalam penggunaan KB sehingga ditemukan beberapa kasus ibu hamil menggunakan KB dalam keadaan hamil bukan pasca keguguran.

Salah satu jenis kontrasepsi KB yaitu KB implan, implan atau KB susuk adalah kontrasepsi yang mengandung hormon progestogen. Layaknya jenis kontrasepsi lainnya, KB implan juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan KB implan yang penting diketahui, yaitu praktis untuk digunakan, efektif mencegah kehamilan, aman untuk ibu menyusui, dan harganya tergolong murah karena untuk penggunaan selama 3 tahun hanya perlu mengeluarkan biaya untuk pemasangan dan pelepasan saja.

Dibalik kelebihannya, KB implan juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya menimbulkan efek samping seperti nyeri bengkak pada kulit disekitar implan ditanam, tidak melindungi dari penyakit, tidak semua orang cocok memakai KB implan. Kondisi yang tidak disarankan menggunakan KB implan, yaitu orang memiliki pembekuan darah dan penyakit liver, mengalami pendarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya dan punya kanker tertentu, mengidap diabetes, serta mengalami sejumlah kondisi seperti sakit kepala migraine depresi, kolesterol tinggi, hipertensi, masalah kandungan empedu, kejang-kejang dan alergi.

Adapun fenomena masalah yaitu :

1. Masih banyak Masyarakat yang kurang memahami tentang kejelasan informasi program KB implan karena kurangnya sosialisasi.
2. Kualitas kemampuan dalam memasarkan pemasangan KB jenis implan masih rendah sehingga masyarakat masih banyak melakukan penolakan.
3. Rasa takut masyarakat terhadap KB implan karena efek samping yang dirasakan setelah pemasangan.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan KB implant di Balai Penyuluh KB Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Peneliti Menyusun proposal skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA(KB) IMPLAN DI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Desa Galumbang dan Desa Bata)”**.

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* yang informan sebanyak 12 orang. Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisis melalui cara reduksi data, serta penyajian data, dan verifikasi untuk penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Komunuikasi

Transmisi

Transimisi adalah proses penyaluran komunikasi dari pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan atau masyarakat agar kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Transmisi dengan melakukan penyuluhan langsung ataupun melalui sosial media kepada PPKBD yang kemudian diteruskan oleh PPKBD ke desa masing- masing, terkait program KB implan yang di lakukan di Kecamatan Juai ini cukup terimplementasi dengan memberikan informasi secara langsung mapun lewat sosial media oleh PPKBD di desa masing-masig dan para penyuluh mempunyai desa binaan masing-masing.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam kebijakan program diperlukan agar masyarakat paham dan mau menerimanya. Terkait kejelasan penyuluh KB dan PPKBD sudah memberikan informasi tentang kebijakan dalam program KB Implan pada Balai Penyuluhan KB Kecamatan Juai belum jelas sesuai dengan pedoman pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana. di Kecamatan Juai ini masih belum terlalu jelas kebijakan yang disampaikan karena masyarakat belum terlalu mengerti mengenai kebijakan program KB Implan.

c. Konsistensi

Konsistensi ini bearti kebijakan yang dijalankan harus dilaksanakan secara terus menerus agar tercapai hasil yang diinginkan dan direncanakan. Konsistensi dalam pemberian informasi terkait KB dari Balai Peyuluhan KB tidak menentu jadwal pelaksanaan setiap tahunnya, itu pun tidak pemberian informasi khusus implan saja tetapi untuk semua jenis kontrasepsi dan PPKBD yang sebagai perpanjangan tangan dari mereka menjalankan tugas memberikan informasi setiap bulannya tetapi kader KB nya pun kurang terampil dalam menyampaikan informasinya ke masyarakat, terkait program KB implan yang di lakukan di Kecamatan Juai ini supaya tidak terjadi simpang siur

yang membingungkan sasaran masyarakat masih kurang terimplementasi karena masih banyak masyarakat yang kurang yakin dan kurang minat menggunakan KB implan.

2. Sumber Daya

a. Staf

Staf adalah sumber daya manusia yang menjalankan suatu kebijakan tanpa adanya staf yang berkaitan dengan program yang direncanakan maka suatu program tidak dapat berjalan dengan baik, staf ini juga berarti bahwa seseorang khusus yang memang diperlukan sesuai dengan program. Namun di Kecamatan Juai Tidak ada staf khusus yang menangani KB Implan karena mereka memberikan penyuluhan secara menyeluruh sama halnya dengan tim kesehatan mereka memberikan pelayanan pemakaian secara keseluruhan alat kontrasepsi karena mereka hanya mempunyai jabatan rangkap yang mana mereka yang melakukan penyuluhan dan mereka juga yang melaksanakan tugas administrasi balai penyuluhan KB.

b. Wewenang

Wewenang adalah limpahan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Para penyuluh KB, PPKBD dan tim Kesehatan sudah menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya yang mana wewenang penyuluh Kb yaitu melakukan pengelolaan program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan KB dengan dibantu oleh PPKBD di setiap desanya dan tim kesehatan yang memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi.

c. Finansial

Finansial berkenaan dengan ketersediaan dana atau anggaran. Mereka mengatakan tidak memiliki data anggaran program kb implan setiap tahunnya karena ketika sudah melaksanakan kegiatan mereka langsung menyerahkan data anggaran ke dinas terkait dan tidak memiliki arsip dari data anggaran tersebut, di Kecamatan Juai belum terlalu memadai karena sesuai dengan hasil wawancara bahwa dilaksanakan terlebih dahulu program itu, berapa pesertanya baru klaim dana ke dinas dan hanya di sediakan setahun sekali secara kolektif.

3. Disposisi

a. Komitmen

Para pelaksana baik itu petugas penyuluh, PPKBD, atau pun tim petugas kesehatan pemasangan implan sudah berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Observasi peneliti, mengenai komitmen petugas dalam pelaksanaan program KB Implan sudah berkomitmen dengan baik.

b. Insentif

Dana insentif program KB implan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan bagi petugas pelaksana yang mengikuti mendapatkan dana insentif dan untuk masyarakat yang mengikuti tidak mendapat dana insentif tetapi dana insentif untuk masyarakat yang mengikuti program KB Implan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan itu tidak ada. Kecuali, jika hari kontrasepsi sedunia baru ada insentif bagi masyarakat.

4. Struktur Birokrat

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah acuan atau prosedur yang menjadi pegangan dalam menjalankan suatu program, karena tanpa adanya SOP program akan berjalan tidak tentu arah dan acak-acakan. Program KB implan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang di tentukan, sesuai dengan SOP, baik itu SOP pada balai penyuluhan KB Kecamatan Juai maupun SOP pada Puskesmas Juai.

b. Struktur Organisasi atau Pembagian Kerja

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian kerja harus jelas agar program dapat dijalankan sesuai dengan jobdisk yang telah ditentukan dan direncanakan. Pada program kb implan di kecamatan Juai Sudah ada pembagian jabatan, tetapi pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing belum ada.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

1. Faktor Penghambat Implementasi Pelaksanaan Program KB Implan

a. Kurangnya Kejelasan Mengenai Kebijakan

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Yang sebagaimana ketidakjelasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait program KB implan ini yaitu tentang kejelasan siapa saja yang dapat menggunakan dan tidak dapat menggunakan KB implan dan kelebihan-kelebihan KB implan karena masyarakat masih banyak yang terkecoh dengan kekurangan KB implan. Salah satunya kejelasan kebijakan yang disampaikan petugas penyuluh pada Desa Galumbang dan Bata belum terlalu jelas karena pihak penyuluh jarang melakukan kedesa-desa dan hanya PPKBDnya saja, jadi otomatis informasi yang didapatkan oleh masyarakat kurang jelas.

b. Faktor keterampilan petugas penyuluh

Masih kurang minat mengenai KB implan karena masih terjadinya kesimpang siuran rumor-rumor mengenai KB implan yang membuat masyarakat takut memakai KB implan, hal ini terjadi karena kemampuan petugas dalam meyakinkan dan memasarkan KB implan masih rendah dan jarang dilakukan.

c. Tidak adanya staff khusus

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KB implan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah tidak adanya staf khusus karena mereka semua mempunyai jabatan rangkap yang mana mereka yang melaukan penyuluhan dan mereka juga yang melaksanakan tugas administrasi pada balai penyuluhan kb.

2. Faktor pendorong Implementasi Pelaksanaan Program KB Implan

Transmisi dalam implementasi program KB implan di Kecamatan Juai sudah berjalan dengan baik dengan cara melakukan penyampaian informasi baik secara langsung maupun lewat sosial media oleh yang dibantu dijalankan oleh PPKBD yang merupakan perpanjangan tangan dari petugas penyuluhan.

SIMPULAN

Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak terimplementasi, terlihat dari Sub variabel Komunikasi indikator kejelasan kurang terimplementasi karena kejelasan pelaksanaan program KB implan masih dianggap masyarakat tidak jelas dalam penyampaian kebijakan dari pelaksanaannya dan indikator konsistensi yang ditunjukkan oleh petugas penyuluh tidak terimplementasi dengan baik, masih ada kesimpang siuran yang membingungkan sasaran masyarakat. Sub variabel sumber daya yang masih tidak tersedianya staf ahli dalam penanganan khusus program KB Implan dan finansial dalam pelaksanaan program KB implan masih tidak terlalu memadai. Sub variabel disposisi insentif untuk para petugas dari pelaksanaan program KB implan ada, untuk insentif para akseptor implan tidak mendapatkan insentif hanya dipelayanan saja gratis kecuali untuk para akseptor yang memasang implan pada hari kontrasepsi sedunia yang diadakan oleh kecamatan baru mendapat insentif berupa uang tunai dan sembako. Terlihat pada sub variabel struktur birokrat indikator pembagian kerja yang tidak ada pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

Adapun variabel yang sudah terimplementasikan dengan baik antara lain: Pertama, Transmisi, penyebaran informasi yang dilakukan dengan cara melaksanakan penyuluhan. Kedua, wewenang para pelaksana program KB implan yang dilaksanakan sudah sesuai. Ketiga, Komitmen dari para pelaksana program KB implan sudah sangat baik. Keempat, SOP yang ada. Faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sebagai berikut: Pertama, kurangnya kejelasan mengenai kebijakan KB implan pada Desa Galumbang dan Desa Bata belum terlalu jelas karena pihak penyuluh jarang melakukan kedesa-desa, masih banyak masyarakat yang memahami informasi mengenai program KB implan. Kedua, Faktor konsistensi penyuluh dalam menjalankan program KB Implan agar tidak terjadi simpang siur yang membingungkan sasaran belum berjalan dengan baik, masyarakat masih banyak yang kurang minat mengenai KB implan karena masih terjadinya kesimpang siuran rumor-rumor mengenai KB implan yang membuat masyarakat takut memakai KB implan, hal ini terjadi karena kemampuan petugas dalam meyakinkan dan memasarkan KB implan masih rendah. Ketiga, tidak ada staf khusus dalam pelaksanaan KB implan, staf khusus yang tidak memadai dalam kebijakan menjadi faktor penghambat Implementasi Program KB implan di Balai Penyuluhan Kecamatan Juai. Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yaitu sebagai berikut: Pertama, dilihat dari indikator transmisi yang mana cara penyebaran informasi dilakukan dengan cara melalui sosial media oleh petugas penyuluh dan dibantu oleh PPKBD sebagai perpanjangan tangan mereka. Kedua, indikator Standar Operasional Prosedur(SOP) dimana Program KB Implan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sudah sesuai SOP.

Maka dari itu disarankan : Kepada Kepala bidang Keluarga Berencana agar dapat melakukan pengawasan dan saling koordinasi terhadap pelaksanaan Program KB yang ada di Kecamatan Juai sehingga mereka mampu bekerja secara efektif dan efisien. Kepada koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Juai agar melakukan penambahan wawasan dan pelatihan terhadap tugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan terutama PPKBD dalam mensosialisasikan program KB untuk melakukan dan berinovasi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

Kepada masyarakat hendaknya terlebih dahulu mengetahui tentang Program Keluarga Berencana (KB) Implan dengan mengikuti sosialisasi, ikut serta dalam bertindak bersama untuk menyukseskan program KB Implan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Alat Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi

Anonim, 2021.Ingin memakai KB implan (susuk)?. (online). Tersedia: <https://puskesmaspadureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/87/ingin-memakai-kb-implan-susuk-> (6 April 2023)

Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Edisi Revisi ke-2*. Bandung : Alfabeta

- Abdoellah, Awan T dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Andini, Ratna Nor. 2021. *Implementasi Program Keluarga Berencana Pria Di Kecamatan Amutai Selatan Kabupaten Balangan (Studi kasus Desa Kayakah, Jumba, dan Simpang Tiga)*, skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai tidak diterbitkan
- Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Imawi, Indri Sri. 2022. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (Studi Kasus Pemakaian Alat Kontrasepsi MKJP Dengan Implan Dan IUD Puskesmas Kab.Asahan)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara tidak diterbitkan.
- Laary, Yurensi, et al. 2022. *Impelementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa baru kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera barat. Jurnal Administrasi Publik Vol. VIII, No. 120, hal 60-67*
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurin, Fajarina. 2022. *Mengulik Seputar KB Implan, dari Cara kerja, Cara Pasang. Hingga Efek Samping*. (online). Tersedia: <https://helohehat.com/seks/kontrasepsi/kb-implan-susuk/> (6 April 2023)
- Putra, Ramadhan A. 2012. *Definisi, Konseling dan Pemasangan Kontrasepsi Implan*. <https://id.scribd.com/document/118330422/kontrasepsi-implan>.(13 maret 2023)
- Subarsono, AG. 2020. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan Ke-11. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cetakan Ke-21. Bandung : Alfabeta
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai*. STIA Amuntai
- Syawaluddin, Muhammad. 2017. *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas PKL Muslim Pasar Suak Bato 26 Ilir di Palembang*, Edisi Pertama. Palembang: CV.Amanah.
- Tim Penyusun Buku. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. STIA Amuntai.
- Wahyuningsih, Nur Utami. *Et al.* 2020. *Buku Saku Ekonomi*. Makassar: Universitas Negara Makassar.
- Wardiah, Mia Lasmi. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Wekke, Ismail Suardi dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Gawe Buku.